

## **BAB I**

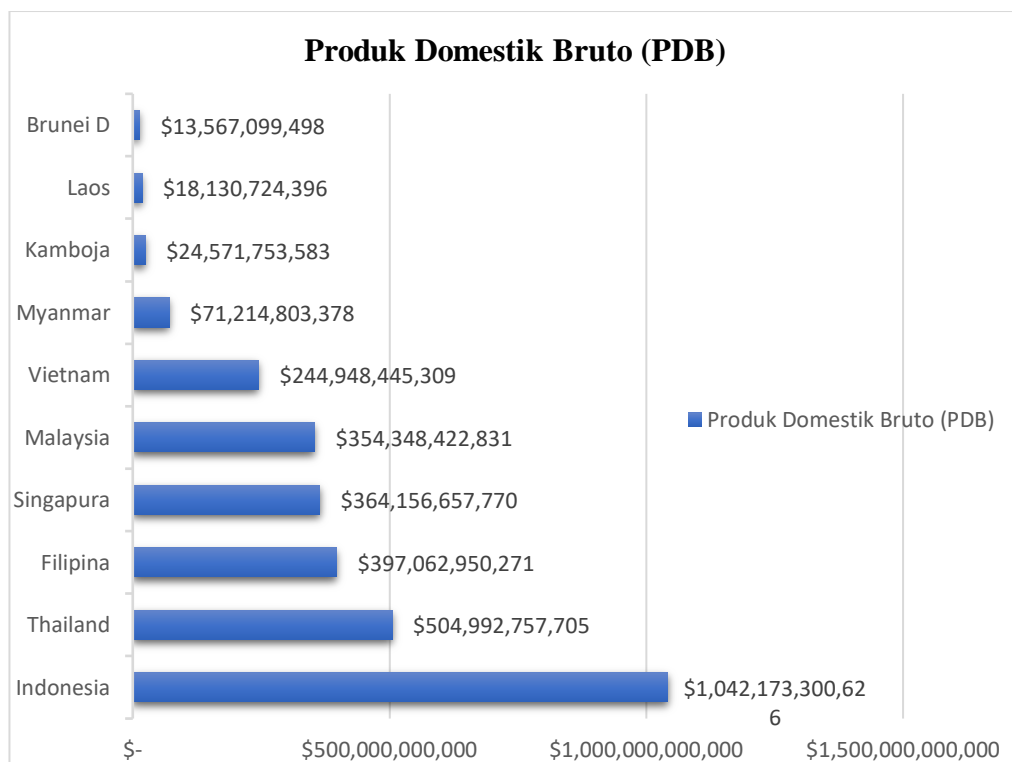
### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi perekonomian suatu negara dapat dikatakan baik apabila tingkat pertumbuhannya meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat jika terjadi sebuah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah proses jangka panjang dari kesuksesan berbagai aktivitas ekonomi suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Indikator penentu dari naik turunnya sektor-sektor ekonomi suatu negara dapat berasal dari luar negeri berupa keadaan atau kondisi perekonomian global, serta dari dalam negeri berupa kebijakan pemerintahan yang diterapkan oleh negara. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi gambaran singkat bagi pihak investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.913.578,68 km<sup>2</sup> dan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke (BPS 2016). Menurut data *World Bank* menyatakan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 sebagai acuannya (Kusnandar 2019). Berdasarkan grafik 1.1, besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku adalah sebesar US\$1.042 triliun atau setara

dengan Rp14.837 triliun pada tahun 2018 (kurs Rp14.239/dolar Amerika Serikat), sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada tahun yang sama atas dasar harga berlaku adalah sebesar US\$3.927 atau setara dengan Rp56 juta. Indonesia menyumbang sebesar 34% PDB di kawasan Asia Tenggara dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) Asia Tenggara sebesar US\$3.035 triliun (World Bank 2019).



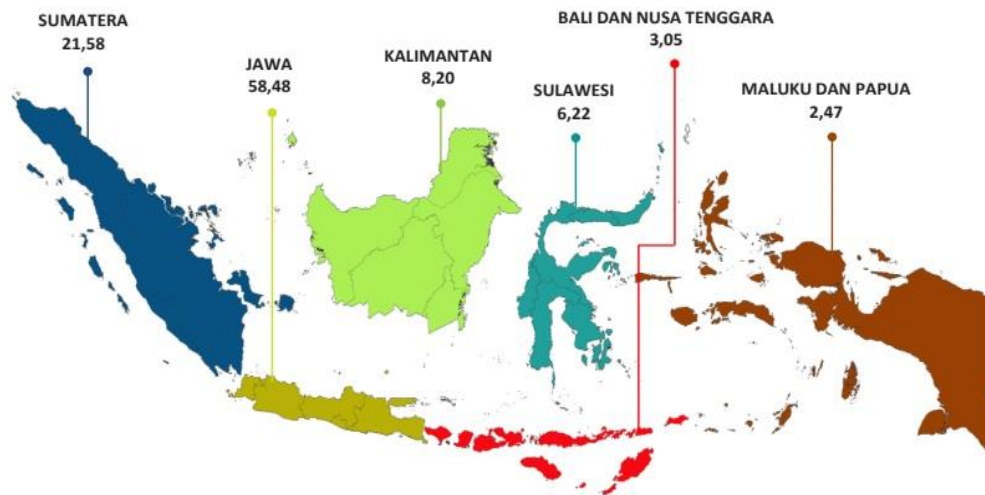
Sumber: World Bank (data diolah), 2019

### Grafik 1. 1

#### Produk Domestik Bruto Negara ASEAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dilihat dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) secara kumulatif dapat dikatakan sukses. Namun apabila jika melihat dari segi pertumbuhan ekonomi secara regional, Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar PDB di Indonesia sehingga terjadi pemusatan

perekonomian dan menciptakan ketimpangan pendapatan khususnya antar pulau di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

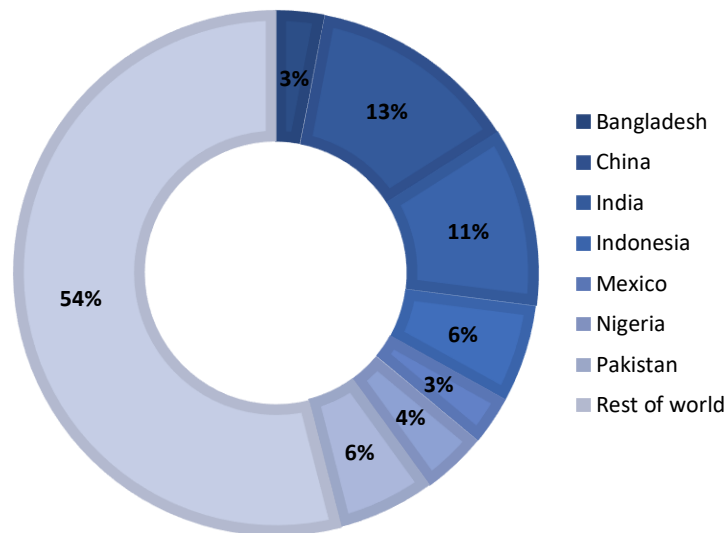
**Gambar 1. 1**

**Peta Pulau Penyumbang PDB di Indonesia (Persen)**

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa setengah dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bersumber dari Pulau Jawa dengan angka sebesar 58,48%. Hal ini menunjukkan negara Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara komulatif, namun tidak diiringi dengan kualitas perekonomian yang baik pada setiap regionalnya. Ketidakmerataan pendapatan pada setiap regional yang menyebabkan kesenjangan sosial maupun infrastruktur antar pulau di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Mandira Sarma (2016) berjudul “*Measuring Financial Inclusion for Asia Economies*” menyatakan bahwa tahapan pengembangan perekonomian yang baik pada suatu negara dapat tercermin melalui pengembangan sektor keuangan. Negara di Asia Timur yang menjadi kiblat perekonomian asia seperti Jepang dan Republik

Korea memiliki kualitas perekonomian yang baik serta tingkat penggunaan sektor keuangan formal yang tinggi.

**Adults Without an Account by Economy (%)**



Sumber: Global Findex database (data diolah), 2017

**Gambar 1. 2**

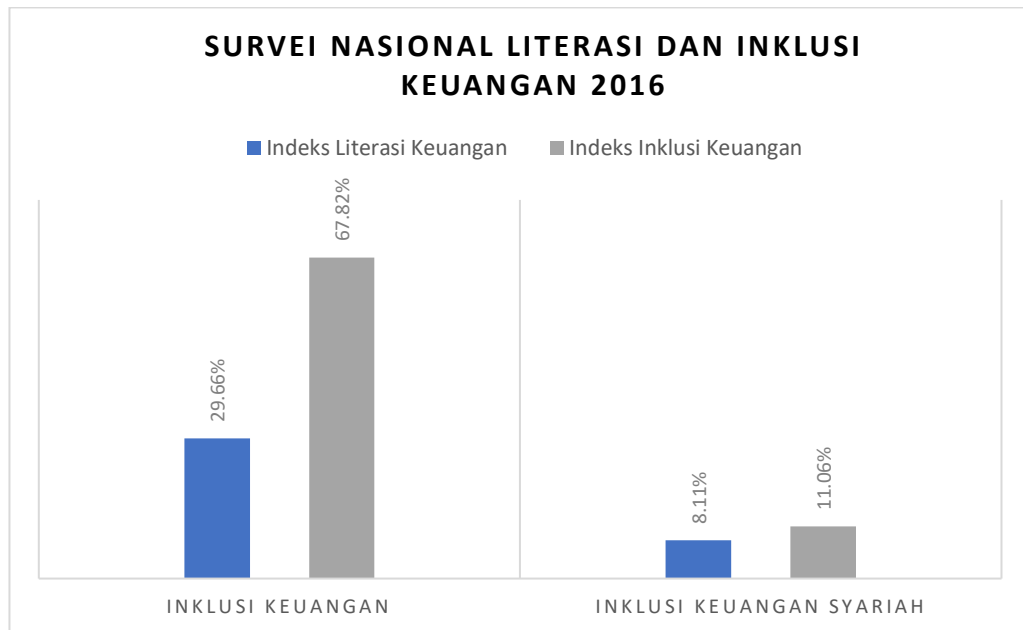
### **Negara di Asia yang Memiliki Penduduk Dewasa *Unbanked* Terbanyak**

Menurut data diatas sebanyak 95 juta penduduk dewasa Indonesia tidak memiliki rekening pada sektor keuangan formal dan menjadikan Indonesia sebagai negara satu-satunya di Asia Tenggara yang menyumbang sebesar 6% populasi *unbanked* di Asia (Demirguc-Kunt dkk. 2017). Masyarakat yang masuk kategori *unbanked* umumnya lebih memilih untuk menggunakan segmen di luar dari sistem keuangan formal atau biasa disebut sebagai jasa keuangan informal seperti: rentenir, bank titil dan sebagainya, dengan bunga pengembalian yang diberikan terlalu tinggi, dan akan berdampak pada eksploitasi pendapatan dan berakibat pada peningkatan angka kemiskinan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *financial exclusion* di Indonesia masih cukup tinggi.

*Financial exclusion* lebih banyak terjadi di antara orang miskin, mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan mereka yang memiliki pendidikan yang minim (Martínez 2016). Negara yang memiliki masalah terkait kemiskinan, berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif melalui penggunaan jasa keuangan formal. *Financial inclusion* menjadi paradigma baru yang merupakan antitesis dari *financial exclusion*.

Istilah inklusi keuangan muncul dan menjadi tren dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi paska krisis tahun 2008. Krisis ekonomi dunia pada saat itu berdampak parah kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbaked* (Bank Indonesia, 2014). Hal ini menjadikan *financial inclusion* salah satu fokus pembangunan pada sektor keuangan diberbagai negara, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan (Nengsih 2015). Indonesia sendiri memiliki tingkat inklusi keuangan yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi (Sarma 2016).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

**Grafik 1. 2**

### **Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016**

Berdasarkan data grafik 1.2 diketahui bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menemukan bahwa indeks inklusi keuangan nasional masih cukup rendah yaitu sebesar 67,82%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya menyumbang sebesar 11,06%. Tingkat penggunaan sektor keuangan syariah di Indonesia sangatlah memprihatinkan jika mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang mana semestinya bisnis dengan konsep syariah memiliki potensi pasar yang besar di negara ini.

Menurut Demirguc-Kunt, et al (2014) (dalam Nengsih, 2015) yang meneliti tentang *Islamic finance and financial inclusion: measuring use of and demand for formal financial services among Muslim adult* menyatakan bahwa orang muslim lebih mungkin memiliki akun resmi di perbankan dibandingkan

non-muslim. Orang muslim berpotensi besar dalam melakukan *financial inclusion* khususnya dalam bidang zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Negara muslim yang menerapkan *financial inclusion* dapat mengimplementasikan program ini dengan memanfaatkan potensi instrumen syariah yang ada guna mencapai tujuan keuangan syariah yang inklusif, dengan memfokuskannya pada peningkatan fasilitas atau infrastruktur syariah.

Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS) adalah salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan (Booklet Keuangan Inklusif, 2014). Penelitian yang dilakukan Sarma (2012) menggunakan pertimbangan inklusi keuangan pada sektor perbankan sebagai analogi dari inklusi keuangan pada suatu daerah. Pengukuran indeks inklusi keuangan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya indeks inklusi keuangan dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan (Umar 2017). Banyak hal yang mempengaruhi peningkatan ketiga dimensi dari Indeks Inklusi Keuangan Syariah pada setiap provinsi, melalui indikator pertumbuhan ekonomi secara regional akan mampu memprediksi kondisi sosial ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Proksi dari pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah koefisien gini, upah minimum provinsi, inflasi dan aset perbankan syariah.

Koefisien gini merupakan alat ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mahmoud Mohieldin, *et al* (2011) (dalam Nengsih, 2015) menyimpulkan bahwa, tingginya penggunaan instrumen ekonomi konvensional akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi khususnya pada negara-negara muslim. Pada sektor keuangan syariah menggunakan prinsip *profit and loss sharing* (PLS) yang merupakan pengganti dari sistem riba yang diterapkan bank konvensional.

Penerapan prinsip *profit and loss sharing* di perbankan syariah dianggap cukup adil dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dibandingkan hanya mengedepankan aspek profit semata yang diterapkan oleh bank konvensional dengan prinsip kapitalis (Prastowo 2018). Melihat dari sistematikanya, konsep ini memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan pendapatan dan pendistribusian kekayaan di antara masyarakat sehingga turut berperan dalam menurunkan tingkat kesenjangan sosial pada suatu daerah. Menurut Iqbal & Mirakhor (2013) (dalam Prastowo, 2018) mengatakan jika merujuk dari tujuan utama bank syariah, maka tidak dapat dipungkiri jika semangat inklusi keuangan dalam perbankan syariah diharap mampu untuk melayani tujuan pengajaran Islam terkait keadilan sosial, penyisipan dan distribusi sumber daya antara yang kaya dan yang miskin. Sehingga visi dari pendirian bank syariah dapat dikatakan sebagai sebuah implementasi dari misi sosial.



Pemerataan menjadi salah satu kunci keadilan sosial yang ingin diciptakan. Nilai keadilan pada suatu wilayah atau regional dapat dikatakan adil apabila mampu mencukupi kebutuhan pekerjanya, maka nilai itu dijadikan sebagai patokan minimum. Sehingga paradikma bahwa adil harus sama, tidak berlaku bagi fenomena pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Sama halnya dengan upah minimum, setiap provinsi di Indonesia memiliki upah minimum yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, kepadatan penduduk dan tuntutan harga komoditas di daerah tersebut. Tingkatan upah atau pendapatan umumnya akan mempengaruhi besaran pendapatan yang akan disimpan sebagai dana tabungan. Kegiatan menabung ini umumnya memerlukan lembaga yang dipercaya sebagai tempat untuk menyimpan uang. Semakin tinggi upah maka semakin besar peluang seseorang dapat menyisihkan pendapatannya. Salah satu hal yang menyebabkan peningkatan upah adalah inflasi. Harga komoditas meningkat maka uang mengalami penurunan dari segi nilai. Kenaikan ini berpotensi dalam mengurangi tingkat dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan dan akan berpengaruh pada aset yang di miliki bank syariah.

Perbankan syariah di Indonesia hanya menguasai kurang lebih 5% pangsa pasar perbankan nasional (Hariana 2017). Aset perbankan syariah cukup rendah jika dibandingkan dengan aset perbankan konvensional, hal ini lah yang mempengaruhi rendahnya *marketshare* dan inklusi keuangan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Ketika aset perbankan syariah meningkat maka

besar kemungkinan indeks inklusi keuangan syariah juga mengalami peningkatan khususnya pada penyaluran dana kepada pelaku usaha.

Pertumbuhan ekonomi regional pada setiap daerah menjadi tolak ukur keberhasilan dari perekonomian suatu daerah. Tingkat perekonomian yang baik akan menjadi signal bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut begitu pun sebaliknya. Selain itu kebijakan dari pemerintah yang berwenang turut menjadi faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pada penelitian ini menggunakan dua periode kepemimpinan yang berbeda. Melalui penelitian secara regional diharap dapat mengetahui secara lebih detail penyebab dari rendahnya angka inklusi keuangan di Indonesia khususnya pada sektor syariah. Pengukuran dan analisis perlu dilakukan guna acuan dalam membuat kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah, serta menjadi wawasan dinamika bagi perbankan agar tidak perlu ragu untuk masuk ke dalam sektor ini. Apabila masyarakat mampu mandiri di bidang keuangan (*financial independence*) maka kesenjangan pendapatan yang terjadi di masyarakat akan mampu teratasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat merata.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan adanya sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia berskala provinsi. Penelitian ini dilakukan guna menjembatani kesenjangan data inklusi keuangan di Indonesia, khususnya pada sektor syariah. Indikator pertumbuhan ekonomi berupa survei sosial ekonomi Indonesia secara regional menjadi variabel yang memiliki

potensi besar mempengaruhi tingkat Indeks Inklusi Keuangan Syariah antar provinsi. Survei sosial ekonomi berupa Koefisien Gini, Upah Minimum Provinsi, Inflasi dan Aset Perbankan Syariah (*Gross Assets*) terhadap tiga indikator utama inklusi keuangan syariah pada setiap provinsi di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional Terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2010-2018.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Koefisien Gini per provinsi terpilih terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) per provinsi terpilih terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh Inflasi per provinsi terpilih terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh Aset Perbankan Syariah (*Gross Assets*) per provinsi terpilih terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi secara regional terhadap tingkat Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS) antar provinsi di Indonesia. Namun secara khusus

penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Koefisien Gini per provinsi terpilih terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) per provinsi terpilih terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi per provinsi terpilih terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Aset Perbankan Syariah (*Gross Assets*) per provinsi terpilih terhadap Indeks Inklusi Keuangan Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk memberikan pengetahuan seberapa penting perhitungan indeks inklusi keuangan khususnya di bidang syariah guna pertumbuhan ekonomi domestik yang mana sebagian besar wilayahnya menganut ajaran Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dan bahan ajar bagi para akademisi, khususnya yang tertarik dengan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi melalui metode inklusi keuangan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah maupun perbankan syariah untuk lebih melihat serta meningkatkan kebijakan dan segmen pasarnya kepada masyarakat

kelompok *in the bottom of the pyramid* agar mampu terciptanya keadilan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi seputar kondisi inklusi keuangan syariah di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut antara lain sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bagian ini berisi tentang uraian dari tinjauan pustaka terdahulu atau penelitian sebelumnya serta kerangka teori yang relevan yang bersumber dari jurnal, artikel ilmiah, website, dan buku-buku yang mendukung penelitian atau yang terkait dengan tema penelitian. Pada bab ini juga memuat kerangka berpikir serta hipotesis dalam penelitian.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bagian ini memuat metode penelitian yang akan digunakan secara rinci yakni berupa pendekatan penelitian yang digunakan serta alasannya, jenis penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, definisi konsep dan variabel serta teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas tentang hasil dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil penelitian yaitu gambaran umum inklusi keuangan provinsi terpilih yang menjadi sampel penelitian, gambaran umum setiap variabel penelitian, deskripsi data, hasil, dan pembahasan.

#### BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran maupun rekomendasi terkait penelitian atau yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian.